

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : IV
Rapat ke- : 5
Jenis Rapat : Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Selasa, 22 Maret 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta
Acara : Membahas:
1. Ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional;
2. Strategi peningkatan produksi pertanian Tahun 2022;
3. Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI;
4. Program prioritas Tahun 2023; dan
5. Isu-Isu aktual lainnya.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) didampingi oleh Rusdi Masse Mappasessu (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-NasDem) dan Anggia Erma Rini, MKM. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PKB)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 40 Anggota dari 53 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H. (Menteri Pertanian);
2. Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian);
3. Dr. Ir. Suwandi, M.Si. (Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian);
4. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian);
5. Ir. Ali Jamil, M.P., Ph.D. (Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian sekaligus Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian);

6. Dr. Ir. Nasrullah, M.Sc. (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian);
7. Dr. Ir. Fadry Djufry, M.Si. (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian);
8. Prof (R). Dr. Ir. Dedi Nursyamsi M.Agr. (Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Kementerian Pertanian);
9. Ir. Bambang, M.M. (Kepala Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian);
10. Budi Waseso (Direktur Utama Perum BULOG) beserta jajaran;
11. Achmad Bakir Pasaman, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero); dan
12. Frans Marganda Tambunan, Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ Holding Pangan *ID FOOD*.

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian, membahas Ketersediaan stok pangan menjelang Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional, Strategi peningkatan produksi pertanian Tahun 2022, Tindak lanjut kunjungan kerja Komisi IV DPR RI, Program prioritas Tahun 2023, dan Isu-Isu aktual lainnya, dibuka pukul 13.00 WIB oleh Ketua Rapat, Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi IV DPR RI menggarisbawahi data perencanaan pencapaian produksi bahan pangan terutama mengantisipasi kebutuhan bahan pangan menjelang hari raya. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk dapat menjamin ketersediaan pangan di semua daerah dengan menugaskan *ID FOOD* dan Perum BULOG untuk memenuhi pasokan dan harga pangan pokok, sehingga tidak terjadi gejolak harga pangan dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan kinerja pertanian tahun anggaran 2022 yang fokus kepada upaya penyediaan pangan nasional, yang diikuti dengan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian untuk mengisi pasar ekspor. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk membuat tata kelola pencapaian produksi kedelai dalam jangka menengah dan panjang.

3. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk segera mengisi kekosongan jabatan Eselon I dan II dengan pejabat yang definitif dalam rangka mendukung optimalisasi kinerja Kementerian Pertanian.
4. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Pertanian terkait rencana program-program prioritas tahun 2023. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian dalam menyusun rencana program dan anggaran tahun 2023 fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan, peningkatan nilai tambah dan daya saing dengan memperhatikan daya dukung ekosistem serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim secara berkelanjutan.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian meningkatkan produksi kelapa sebagai alternatif solusi untuk produksi minyak goreng sekaligus substitusi minyak sawit, melalui percepatan Gerakan Nasional Kelapa.
6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perkebunan untuk memanfaatkan kewenangannya dalam melakukan pemanfaatan dana perkebunan yang dikelola oleh BPDPKS lebih besar lagi untuk kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, dan perbaikan infrastruktur perkebunan kelapa sawit sehubungan dengan kerusakan infrastruktur dan rendahnya kualitas budi daya perkebunan rakyat.
7. Komisi IV DPR RI menyarankan Kementerian Pertanian melakukan evaluasi untuk mencabut Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyerahkan data kepemilikan kebun kelapa sawit (perorangan, koperasi, dan/atau perusahaan) yang masuk kawasan hutan. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk mendorong percepatan legalisasi kebun rakyat maksimal 5 hektar, agar dapat mengakses program Pengembangan Sawit Rakyat.
9. Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk segera mengaplikasikan sistem digitalisasi stok pupuk yang dilaporkan kepada BPK RI setiap waktu, untuk mengantisipasi penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi dan segera merealisasikan kegiatan *agro solution* dengan target 252.000 hektar di seluruh Indonesia.
10. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan restrukturisasi proporsional anggaran untuk program utama Kementerian Pertanian sehingga tepat sasaran dan bermanfaat bagi

petani yang disesuaikan dengan kebutuhan petani antara lain, anggaran pengembangan Pupuk Organik, UPPO, dan Alat Mesin Pertanian dan akan dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat selanjutnya.

11. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan untuk membayar tagihan pelepasan stok CBP kepada Perum BULOG sebesar Rp185.809.449.124,55 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat koma lima puluh lima rupiah) sehingga perusahaan dapat beroperasi, melakukan tugas dan fungsinya sebagai stabilisator pasokan dan harga pangan pokok nasional. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian untuk segera menyelesaikan administrasi penagihan dan pembayaran atas tagihan Perum BULOG.
12. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menerapkan mekanisme importasi larangan terbatas (LARTAS) untuk komoditas kedelai, gandum, dan jagung.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.10 WIB.

Menteri Pertanian,

Ttd.

Prof. Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si., M.H.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.
A-151